

# EKONOMI INFORMAL DI INDONESIA, SUATU TINJAUAN PUSTAKA

Oleh:

Astrid Amalia Noeraini

Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran

## **ABSTRACT**

*The informal economy is still contribute for more than half of the country's Gross Domestic Product. Although the number of informal workers showed a decreasing trend in the last five years, but still have a substantial population. This paper tries to examine the informal economy from a number of existing literature. Especially of recent publications Central Bureau of Statistics and other empirical researches. The result is that the informal workers characteristics has not changed much since previous studies. The informal workers, who can be found both in the informal and formal sectors, most of them are women, live in rural areas, tend to be evenly distributed to all age groups and almost half of them are underemployed, have low education background and less income.*

**Keywords:** *informal economy, labour economics.*

## **PENDAHULUAN**

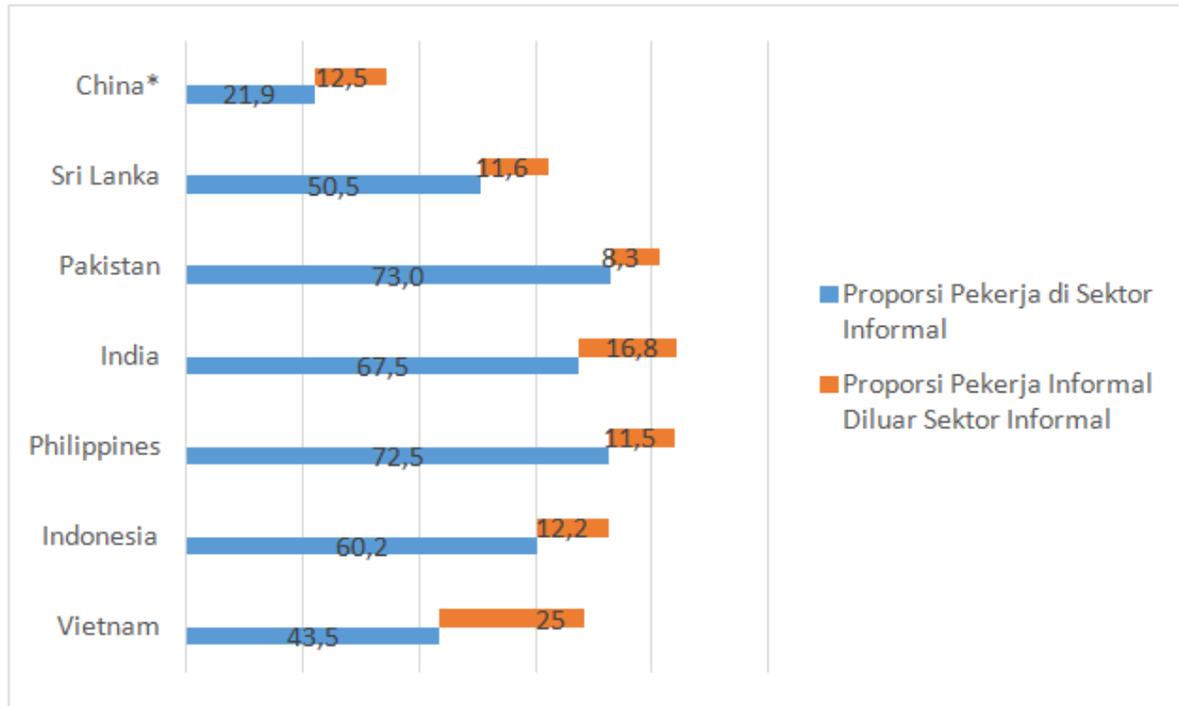
Sektor informal identik dengan ketidakorganisasian (*unorganized*), ketidakteraturan (*unregulated*), tidak terdaftar, dan merupakan tempat bagi mereka yang berpendidikan rendah dan tidak mampu bersaing menuju posisi pekerjaan yang mapan di sektor formal. Mereka umumnya berada dalam unit usaha berskala kecil, dengan kuantitas yang cukup banyak sehingga seringkali mengganggu ketertiban kota. Karakteristik lainnya adalah kepemilikan oleh individu, menggunakan teknologi yang sangat sederhana, sulit untuk mengakses permodalan ke lembaga keuangan, umumnya memiliki produktifitas tenaga kerja yang juga rendah serta tingkat upah yang rendah pula.

Kelebihan tenaga kerja pertanian perdesaan membuat mereka bermigrasi ke perkotaan untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Dan sektor ekonomi informal dianggap yang tercepat dan termudah untuk dimasuki sebagai tujuan sementara sebelum selanjutnya menuju sektor formal. Jadi sektor ini dianggap hanya sebagai batu loncatan atau transisi saja.

Terdapat keterkaitan yang sangat erat antara sektor informal dengan sektor formal perkotaan. Para pekerja sektor formal sangat tergantung terhadap ketersediaan produk murah yang disediakan oleh sektor informal. Sebaliknya, kelangsungan sektor informal sangat tergantung perkembangannya dari pertumbuhan sektor formal, sebagai konsumen.

Di banyak negara berkembang ekonomi informal mewakili setidaknya 2/3 dari total (formal & informal) pekerjaan non-pertanian. Di Asia Selatan dan Tenggara proporsi pekerja di sektor informal melebihi pekerja informal di sektor formal. Namun angka tertinggi pekerja informal diluar sektor informal berada di India dan Vietnam (ILO, 2013).

**Gambar 1**  
**Proporsi Pekerja di Sektor Informal dan Pekerja Informal di Sektor Informal Sejumlah Negara Asia, Tahun Tertentu\*\***



\* Data China hanya mencakup enam kota yakni Fuzhou, Guangzhou, Shanghai, Shenyang, Wuhan, dan Xi-an.

Indonesia hanya Provinsi Banten dan DI Yogyakarta.

\*\* Philippines data tahun 2008.

Indonesia, Sri Lanka, Vietnam data pada tahun 2009.

India dan Pakistan data tahun 2009-2010.

China data tahun 2010.

Sumber, ILO, 2013

Salah satu kantong pekerja informal adalah usaha mikro, kecil dan menengah. Saat ini jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Indonesia ada lebih dari 50 juta unit usaha dengan pertumbuhan rata-rata di atas dua persen dalam lima tahun terakhir serta pertumbuhan pekerja yang hampir sama banyaknya. Sumbangannya terhadap Produk Domestik Bruto tahun 2012 sebesar 57.46 persen (BPS, 2014). Dari banyaknya pelaku usaha serta sumbangannya terhadap perekonomian tersebut yang sangat besar, seolah tidak terdapat pergeseran dari usaha informal menjadi formal maupun pergeseran tenaga kerja informal menjadi tenaga kerja formal.

### Identifikasi Masalah

Keberadaan sektor informal yang sangat besar di Indonesia masih merupakan pemberi pekerjaan bagi sebagian besar angkatan kerja di Indonesia. Lemahnya program jaminan sosial membuat mereka yang tidak dapat mengakses pekerjaan di sektor formal terpaksa mencari penghasilan di bidang informal demi bertahan hidup. Sektor ini pula yang menjadi

penyelamat Indonesia saat krisis ekonomi di saat sektor formal tidak bisa lagi menampung derasnya penawaran tenaga kerja.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka perlu kiranya dikaji bagaimana keadaan ekonomi informal di Indonesia kini. Tulisan ini merupakan tinjauan literatur yang terutama didapat dari data Survey Tenaga Kerja Nasional (Sakernas) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan diterbitkan dalam sejumlah publikasi BPS serta Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi ditambah dari beberapa sumber lainnya baik berupa penelitian empiris maupun tinjauan literatur lainnya seperti dari Organisasi Perburuhan Internasional (ILO).

### **Tujuan Penelitian**

Dalam beberapa tahun terakhir secara kasat mata seolah terjadi peningkatan kegiatan sektor informal meski data resmi menunjukkan fenomena sebaliknya. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan suatu gambaran mengenai kondisi ekonomi informal terkini sebagai salah satu komponen penting sumber mata pencaharian pada lebih banyak angkatan kerja di Indonesia.

### **Manfaat Penelitian**

Tulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu ekonomi perburuhan serta sebagai masukan kepada pemangku kebijakan dalam penanganan ekonomi informal, terutama dalam pembuatan kebijakan terkait perizinan, perpajakan, serta penyediaan infrastruktur.

### **Konsep Ekonomi Informal**

Konsep informalitas muncul sejak 1970-an, sejak dicetuskannya istilah “sektor informal” yang umumnya mengacu pada penyediaan lapangan kerja dan produksi pada perusahaan kecil, baik berusaha sendiri maupun dengan jumlah karyawan yang sedikit, atau tidak terdaftar secara resmi. Kemudian pada Konferensi Internasional Statistisi Perburuhan ke- 17 pada 2002 konsep “Sektor Informal” dikembangkan menjadi “Ekonomi Informal”. Melalui konsep terkini yang lebih luas informalitas dapat ditemukan baik pada pekerjaan yang menghasilkan upah maupun wirausaha pada sektor ekonomi yang beragam, yang bisa muncul pada unit ekonomi informal maupun formal. Walaupun tetap saja kebanyakan pekerjaan informal muncul pada sektor informal, akan tetapi banyak pula pekerja pada perusahaan formal dipekerjakan secara informal. Faktanya, 12-20 persen pekerja pada negara-negara tertentu dipekerjakan secara informal di luar sektor informal. Proporsi pekerjaan informal non-pertanian mencapai hampir 72,5 persen di Indonesia pada 2009, yang terdiri dari 60,2 persen dipekerjakan pada sektor informal dan 12,2 persen dipekerjakan secara informal selain pada sektor informal (ILO, 2013).

Secara lebih rinci ILO/WIEGO (2013) mendefinisikan informalitas ekonomi ke dalam tiga konsep utama, yakni:

1. Sektor informal, dimana mengacu pada produksi dan lapangan pekerjaan pada perusahaan yang tidak terdaftar secara resmi;
2. Lapangan kerja informal, yang memfokuskan pada pekerjaan diluar peraturan perlindungan tenaga kerja setempat, baik itu pada perusahaan formal maupun informal;

3. Ekonomi informal, yang mana mencakup seluruh perusahaan, pekerja, dan aktivitas yang berlangsung diluar kerangka peraturan ketenagakerjaan setempat dan output yang mereka hasilkan.

Pada kerangka yang dikembangkan Ralf Hussmanns ini dijabarkan contoh kelompok pekerja tertentu yang dipekerjakan pada sektor informal dan tenaga kerja informal yang dipekerjakan selain pada sektor informal yaitu:

1. Mereka yang dipekerjakan di sektor informal, meliputi:
  - Pekerja yang berusaha sendiri pada perusahaan miliknya;
  - Pemberi kerja pada perusahaan informal;
  - Pekerja pada sektor informal;
  - Pekerja keluarga yang bekerja pada perusahaan informal;
  - Anggota jaringan produsen informal/koperasi informal.
2. Pekerja informal yang bekerja di luar sektor informal, khususnya:
  - Pekerja pada sektor formal yang tidak terlindungi oleh perlindungan sosial, tidak terdaftar secara resmi, atau tidak mendapatkan hak pekerja seperti gaji tahunan atau cuti sakit yang tetap dibayar;
  - Pekerja rumah tangga bayaran yang tidak terlindungi dan tidak mendapat hak-hak pekerja seperti di atas;
  - Anggota rumah tangga yang dipekerjakan di perusahaan formal.

Sejumlah negara juga menyertakan pekerja yang memproduksi barang secara khusus digunakan untuk kegunaan akhir di rumah tangga mereka, seperti pertanian subsisten/gurem untuk konsumsi sendiri sebagai pekerja informal (ILO, 2013).

Berdasarkan Kerangka Konseptual ILC 2002, Konferensi Internasional Statistisi Perburuhan (ICLS) ke-17 tahun 2003 mengadopsi “Pedoman tentang definisi statistik lapangan kerja informal” dan mendefinisikan “pekerjaan informal” sebagai jumlah pekerjaan informal, baik dilakukan pada perusahaan yang bergerak dalam sektor formal, perusahaan sektor informal, maupun rumah tangga, selama periode tertentu. Pekerjaan informal terdiri dari pekerja yang hubungan kerjanya tidak tunduk pada aturan ketenagakerjaan, perpajakan, perlindungan sosial, atau hak-hak pekerja sebagaimana yang lazim ditentukan (pemecatan dengan pemberitahuan sebelumnya, pesangon, cuti tahunan atau sakit dengan hak penuh, dll), wirausaha, pengusaha, dan anggota koperasi/perhimpunan dalam unit produksi informal, seluruh pekerja keluarga (tak dibayar); dan orang-orang yang terlibat dalam produksi barang untuk penggunaan akhir sendiri.

Pedoman tersebut menyerahkan kriteria operasional dalam penentuan definisi pekerjaan informal sesuai dengan keadaan masing-masing negara. Sehingga dimungkinkan tidak adanya pengertian tunggal terkait konsep ini.

Lebih jauh ditambahkan bahwa pekerja informal juga mencakup mereka yang berkerja pada perusahaan formal namun berada dalam tingkat informalitas yang berbeda, misalnya pekerja yang dikontrak tanpa jaminan sosial, maupun jaminan sosial tanpa hak upah lembur dan sejenisnya (Widarti, 2006).

Dari temuan penelitian dan data resmi dapat dirangkum mengenai segmentasi ekonomi informal sebagaimana dikemukakan oleh Chen (2007). Fakta utama adalah bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antar pendapatan dalam ekonomi informal. Pada dasarnya pengusaha di sektor informal mendapatkan penghasilan yang paling besar, diikuti oleh pekerja informal, mereka yang berusaha sendiri, pekerja upahan biasa atau pekerja musiman,

dan terendah adalah pekerja lepas atau pekerja rumahan. Fakta yang kedua adalah, secara global, laki-laki lebih banyak berada pada segmen teratas pada ekonomi informal dan perempuan lebih sering berada pada posisi terendah. Dan urutan di tengah bervariasi antara perempuan dan laki-laki tergantung pada sektor dan negara.

**Gambar 2**  
**Segmentasi Ekonomi Informal**



Sumber: Chen, 2007

Sementara Mohamad Ikhsan (2005) merangkum karakteristik pekerja informal Indonesia, yaitu:

- Sektor informal menguasai 2/3 dari total lapangan kerja dan sekitar 80 persennya berada di perdesaan, sementara hampir separuh lapangan kerja di kota berada di sektor informal;
- Sekitar 2/3 lapangan kerja sektor informal tergolong berusaha sendiri (*self employed*);
- Upah di sektor informal jauh lebih rendah daripada di sektor formal, yang pada gilirannya dapat menyebabkan penurunan tingkat upah secara agregat.

### **Sejarah Sektor Informal**

Embrio istilah “sektor informal” dikenal setelah Perang Dunia II. Entah modelnya berasal dari “pusat vs pinggiran”-nya Raul Prebisch (1949), “penawaran tenaga kerja yang tidak terbatas” oleh Arthur Lewis (1954), “tekanan besar”-nya Harvey Leibenstein (1957), atau “tahapan pertumbuhan ekonomi”-nya W.W. Rostow (1960), namun metode agumentasinya cenderung relatif serupa (Bangasser, 2000). Di mana sektor ini cenderung muncul pada negara-negara dunia ketiga.

Dikenalnya sektor informal tidak lepas dari teori transformasi struktural yang dikemukakan Sir William Arthur Lewis yang menampung kelebihan tenaga kerja sektor tradisional pertanian di perdesaan yang produktifitasnya sangat rendah dan berpindah menuju sektor industri di perkotaan yang berproduktifitas tinggi. Lebih lanjut Harris-Todaro mengemukakan bahwa pekerja sektor pertanian perdesaan yang berpengetahuan terbatas dan ingin memasuki sektor formal perkotaan menjadikan sektor informal sebagai batu loncatan

atau transisi sebelum memasuki tujuan utama mereka sambil mempersiapkan diri menuju sektor formal perkotaan (Todaro, 2006).

Dari teori-teori tersebut sebetulnya diharapkan keberadaan sektor informal hanya sementara hingga kondisi ekonomi membaik. Awalnya fenomena tenaga kerja yang tidak dapat terserap oleh pasar dan bekerja diluar sistem ini berusaha dihambat perkembangannya atau malah diabaikan. Akan tetapi hingga kini terlihat bahwa sektor informal mendominasi penyerapan lapangan kerja, terutama di negara-negara berkembang.

Pada 1973 Keith Hart memperkenalkan istilah sektor informal yang didasarkan pada penelitiannya di Aggra, Ghana. Ia merujuk sektor formal sebagai pekerjaan yang menghasilkan upah tetap dan mengasosiasikan pekerjaan informal sebagai berusaha sendiri atau berwirausaha. Berlawanan dengan pandangan dualistik, sektor informal dipandang Hart sebagai pendobrak hambatan masuk bagi mereka yang ingin bekerja sebagai pengusaha. Sektor ini ditengarai sebagai sesuatu yang mana rendahnya tingkat modal fisik akan dikompensasi dengan kualitas modal manusia dan kreativitas yang lebih tinggi. Dengan demikian, sektor ini dipandang sebagai strategi sukarela bagi pengusaha cerdas agar bisa memulai usaha mereka dengan biaya rendah. Sementara Hernando de Soto mengemukakan alasan utama berkembangnya sektor informal bukanlah akibat surplus tenaga kerja namun dari sulit dan mahal biaya dan proses birokrasi seperti kewajiban pemenuhan akan tingkat upah minimum, biaya kesehatan, serta aturan tenaga kerja dan perijinan yang berbelit-belit (Portes dan Schauflier pada Kay, 2011).

Berbeda halnya dengan Yamada (1996), dimana teruji adanya penghasilan yang kompetitif dan pilihan sukarela untuk menjadi wirausaha informal. Selanjutnya dari data longitudinal ditemukan bahwa hanya individu yang berhasil dalam wirausaha informal yang bertahan pada sektor ini. Mereka yang kemampuan berusaha-sendirinya kurang baik akan meninggalkan sektor ini untuk kemudian berpindah mencari pekerjaan lainnya yang lebih sesuai.

**Tabel 1**  
**Jumlah Pekerja Formal dan Informal Indonesia 2015**  
**(dalam nominal per juta orang dan persen)**

Kategori Sektor	Nominal	Persentase
<b>Total</b>	<b>120,85</b>	<b>100</b>
Formal	58,19	48,15
Informal	62,66	51,85
<b>Formal</b>	<b>58,19</b>	<b>100</b>
Laki-laki	37,63	64,67
Perempuan	20,56	35,33
Perkotaan	41,09	70,61
Perdesaan	17,10	29,39
<b>Informal</b>	<b>62,66</b>	<b>100</b>
Laki-laki	35,80	57,13
Perempuan	26,86	42,87
Perkotaan	24,79	39,57
Perdesaan	37,87	60,43

Sumber: BPS, 2015

## Pekerja Informal di Indonesia

Untuk tahun 2015 jumlah pekerja formal Indonesia adalah sebesar 58,19 juta orang atau sebesar 48,15 persen yang mana sebagian besar berada di perkotaan dan berjenis kelamin laki-laki. Sementara untuk pekerja informal lebih banyak berada di perdesaan, sebagaimana pada tabel 1. Secara keseluruhan kebanyakan pekerja adalah laki-laki. Pada sektor formal terlihat laki-laki lebih tinggi proporsinya dibandingkan pekerja informal. Sementara untuk pekerja informal perempuan jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan pekerja formalnya (BPS, 2015).

Banyaknya pekerja informal perempuan yang mendominasi tersebut sejalan dengan temuan Pardede dan Listya (2013) bahwa laki-laki cenderung menunjukkan tendensi yang lebih rendah ketimbang perempuan untuk bekerja di sektor informal.

Untuk daerah, sebagian besar pekerja informal berada di perdesaan dan pekerja formal di perkotaan. Hal ini sejalan dengan M.Ikhsan (2005) yang menyatakan bahwa sektor informal lebih terkonsentrasi di perdesaan dibandingkan perkotaan.

**Tabel 2**  
**Jumlah Pekerja Formal dan Informal Indonesia Berdasarkan Status Pekerjaan dan Jenis Pekerjaan Utama, 2004 dan 2015**

Jenis/Status Pekerjaan Utama	Tenaga Profesional, Teknisi & yang Sejenis		Tenaga Kepemimpinan & Kegalaksanaan		Tenaga Tata Usaha & sejenis		Tenaga Usaha Penjualan		Tenaga Usaha Jasa		Tenaga Usaha Pertanian, Kehutanan, Perburuan & Perikanan		Tenaga Produksi, Operator Alat Angkutan & Pekerja Kasar		Lainnya		TOTAL	
	2004	2015	2004	2015	2004	2015	2004	2015	2004	2015	2004	2015	2004	2015	2004	2015	2004	2015
Berusaha sendiri tanpa dibantu orang lain	90.557	508.737	4.970	-	57.788	73.199	7.319.128	8.169.865	1.066.706	1.135.671	4.306.494	6.188.153	5.463.645	5.577.646	-	-	18.309.288	21.653.271
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/ buruh tak dibayar	17.767	56.498	3.361	134077	18.097	28.332	3.943.036	4.501.426	208.089	297.349	15.633.844	12.128.384	1.688.211	1.652.563	-	-	21.512.405	18.798.629
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	29.754	112.891	18.959	477125	21.258	62.670	658.100	1.019.015	121.438	257.944	1.014.662	1.193.505	1.101.722	1.087.341	-	-	2.965.893	4.210.501
Buruh/Karyawan/Pegawai	2.940.138	7.676.446	148.845	762414	4.237.506	6.688.749	2.376.406	4.622.446	2.987.509	5.066.724	1.946.482	3.098.921	10.502.890	18.081.010	319.778	620.824	25.139.776	46.617.534
Pekerja bebas di pertanian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.449.921	5.018.051	-	57.962	-	-	4.449.921	5.076.013
Pekerja bebas di nonpertanian	36.210	81.699	-	-	15.500	25.630	165.466	228.188	380.701	529.766	-	-	3.134.961	5.937.825	-	-	3.732.838	6.803.128
Pekerja keluarga/tak dibayar	16.255	27.119	207	-	25.629	67.127	2.711.661	3.765.789	123.454	349.160	13.058.889	11.909.379	1.356.042	1.569.171	-	-	17.292.137	17.687.745
<b>TOTAL</b>	<b>3.130.681</b>	<b>8.463.390</b>	<b>176.342</b>	<b>1.373.626</b>	<b>4.375.778</b>	<b>6.945.707</b>	<b>17.173.797</b>	<b>22.306.729</b>	<b>4.887.897</b>	<b>7.636.634</b>	<b>40.410.292</b>	<b>39.536.393</b>	<b>23.247.471</b>	<b>33.963.518</b>	<b>319.778</b>	<b>620.824</b>	<b>93.722.036</b>	<b>120.846.821</b>
Jumlah Formal	3.114.426	8.436.271	176.135	1.373.626	4.350.149	6.878.580	6.977.542	10.142.887	3.317.036	5.622.017	2.961.144	4.292.426	13.292.823	20.820.914	319.778	620.824	34.509.033	58.187.545
Jumlah Informal	16.255	27.119	207	-	25.629	67.127	10.196.255	12.163.842	1.570.861	2.014.617	37.449.148	35.243.967	9.954.648	13.142.604	-	-	59.213.003	62.659.276
Proporsi Formal	99,48%	99,68%	99,88%	100,00%	99,41%	99,03%	40,63%	45,47%	67,86%	73,62%	7,33%	10,86%	57,18%	61,30%	100,00%	100,00%	36,82%	48,15%
Proporsi Informal	0,52%	0,32%	0,12%	0,00%	0,59%	0,97%	59,37%	54,53%	32,14%	26,38%	92,67%	89,14%	42,82%	38,70%	0,00%	0,00%	63,18%	51,85%

Sektor Formal
  Sektor Informal
  Sektor Formal & Informal

Sumber: BPS, diolah

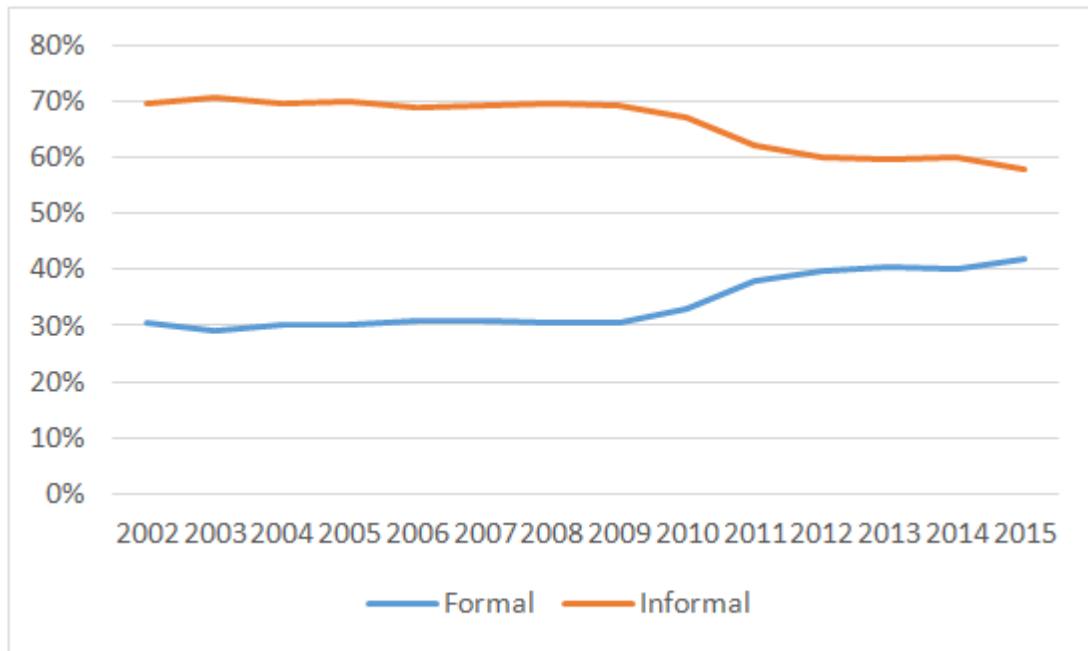
Dari batasan kegiatan formal dan informal berdasarkan status pekerjaan dan jenis pekerjaan utama yang diterbitkan Badan Pusat Statistik, maka dapat dihitung jumlah masing-masing pekerja formal dan informal. Tabel 2 menunjukkan batasan tersebut, yaitu:

1. Status pekerjaan berusaha dibantu buruh dibayar dan buruh/karyawan/pegawai seluruhnya merupakan pekerja formal;
2. Untuk mereka yang berstatus berusaha sendiri tanpa dibantu, pekerja bebas di pertanian dan non-pertanian dengan jabatan tenaga profesional, tenaga kepemimpinan, dan tenaga tata laksana merupakan pekerja formal, selain itu merupakan pekerja informal;
3. Mereka yang berstatus berusaha dibantu buruh tidak dibayar dengan jenis pekerjaan tenaga usaha pertanian, kehutanan perburuan, dan perikanan adalah pekerja informal, sisanya merupakan pekerja formal, kecuali jenis pekerjaan lainnya yang dapat termasuk sebagai pekerja formal maupun informal;

4. Pada status pekerja keluarga, semuanya masuk dalam ekonomi informal.

Tabel 2 menampilkan perbandingan data tahun 2004 dan 2015 berdasarkan batasan di atas, dimana jumlah tenaga kerja informal menunjukkan sedikit penurunan pada 2015 dibandingkan dengan tahun 2004.

**Gambar 3**  
**Proporsi Sektor Formal dan Informal Indonesia, 2002-2015**



Sumber: BPS, berbagai terbitan, diolah

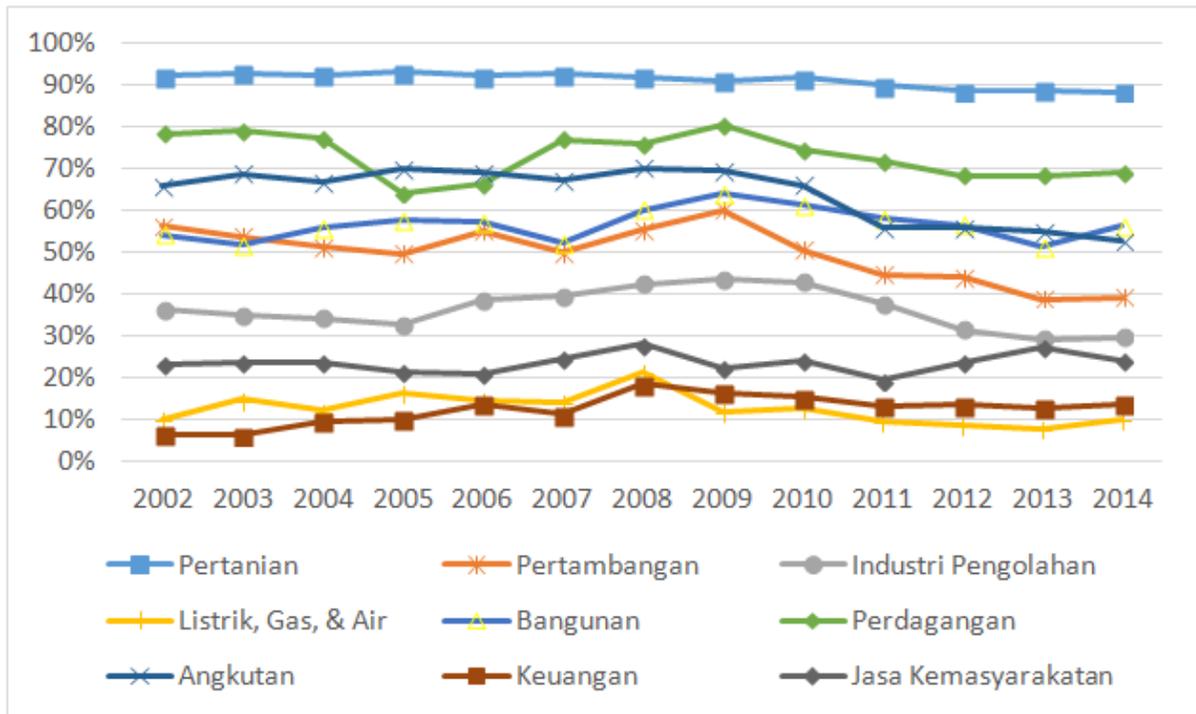
Menurut Berita Resmi Statistik yang diterbitkan Badan Pusat Statistik, secara sederhana kegiatan formal dan informal dari penduduk yang bekerja dapat diidentifikasi berdasarkan status pekerjaan. Dari tujuh kategori status pekerjaan utama, pekerja formal mencakup kategori berusaha dengan dibantu buruh tetap dan kategori buruh atau karyawan atau pegawai, sisanya termasuk pekerja informal (BPS, 2015).

Dari gambar 3 nampak bahwa terjadi penurunan pekerja informal dan peningkatan pekerja formal mulai tahun 2010. Pola yang sama juga pernah terjadi di Indonesia pada tahun 1993-1996 sebelum pekerja informal mulai kembali meningkat pasca krisis ekonomi pada tahun 1998 dengan kecenderungan penyerapan tenaga kerja informal sebesar 70 persen dan pekerja formal 30 persen (Nazara, 2010). Diharapkan kondisi penurunan pekerja informal yang terjadi kini terus berlangsung sehingga kesejahteraan pekerja dan penduduk Indonesia pada umumnya akan terus meningkat.

Pada karakteristik berdasarkan lapangan usaha, tenaga kerja informal paling banyak terdapat di sektor pertanian yang mengalami sedikit penurunan dari 91,92 persen pada 2002 menjadi 88,17 persen pada 2014. Untuk sektor manufaktur dapat dikatakan sebagai tempat bagi pekerja formal, kecuali pada sektor bangunan dimana terdapat pekerja lepas dengan jumlah signifikan. Tenaga kerja informal paling sedikit terdapat di sektor keuangan serta pada sektor listrik, air, dan gas. Pada sektor keuangan proporsi pekerja informal meningkat dari

6,07 persen pada 2002 menjadi 13,64 persen pada 2014. Anggapan bahwa sektor tersier identik dengan informalitas tenaga kerja terjadi pada sektor perdagangan dan angkutan. Sementara untuk sektor keuangan dan jasa kemasyarakatan menunjukkan proporsi informalitas yang rendah.

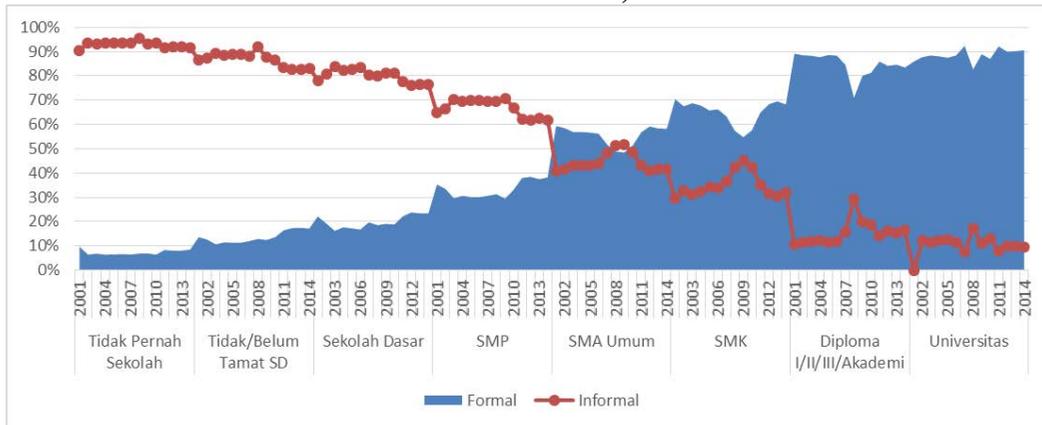
**Gambar 4**  
**Komposisi Pekerja Informal Menurut Lapangan Usaha Indonesia, 2002-2014**



Sumber: BPS, 2015, diolah

Untuk karakteristik berdasarkan tingkat pendidikan terlihat bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan pekerja maka akan cenderung untuk menggeluti sektor formal. Penduduk yang berpendidikan rendah, terutama mereka yang tidak pernah bersekolah, tidak tamat SD dan tamatan SD, sebagian besar berusaha sendiri dengan dibantu buruh tidak tetap atau tidak dibayar. Sedangkan mereka yang tamatan SMP, SMA, dan SMK, selain bekerja sebagai buruh, juga banyak yang berusaha sendiri tanpa dibantu orang lain. Ini berarti mereka yang berpendidikan rendah tidak mampu untuk memasuki pasar kerja formal, sehingga bertahan di sektor informal. Sejalan dengan pandangan yang menyebutkan bahwa para wirausahawan Indonesia lahir sebagian besar karena kebutuhan untuk bertahan hidup.

**Gambar 5**  
**Komposisi Pekerja Formal dan Informal Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Indonesia, 2002-2014**



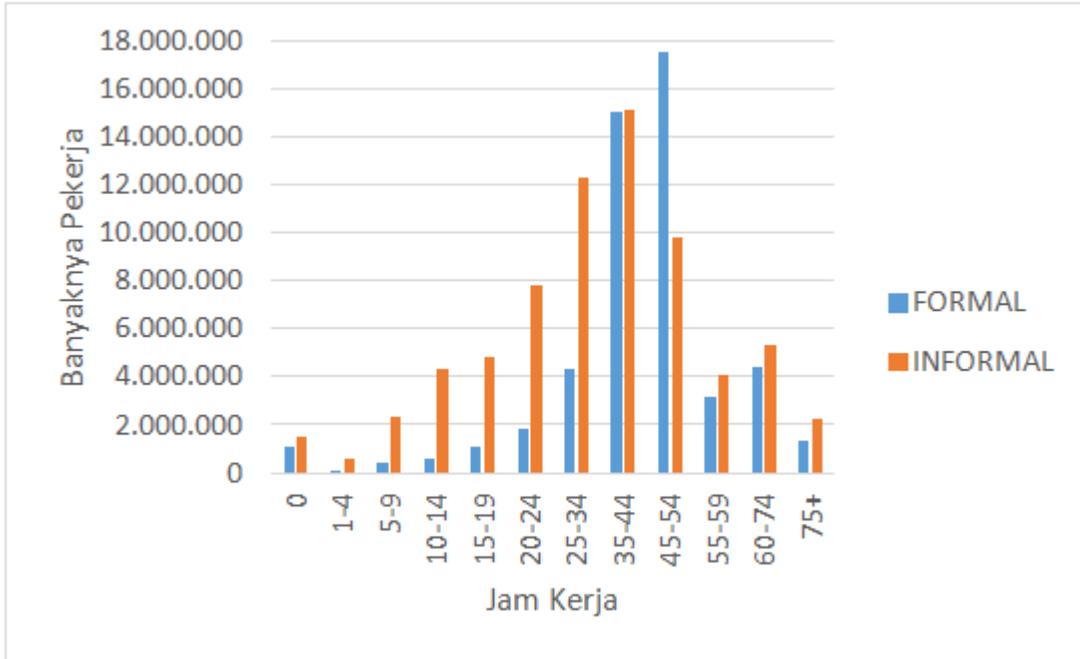
Sumber: BPS, 2015

Meskipun lulusan SMA Umum kuantitasnya jauh lebih besar, namun lulusan SMK terlihat lebih banyak yang memasuki sektor formal dibandingkan dengan lulusan SMA Umum. Dimana pada 2001-2014 rata-rata pekerja formal lulusan SMK sebesar 65,03 persen dibandingkan dengan mereka yang lulusan SMA sebanyak 55,51 persen. Hal ini patut menjadi pertimbangan pemerintah agar dapat menyediakan lebih banyak pendidikan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Demikian pula pada Manning dan Pratomo (2013) dan Pardede dan Listya (2013) yang menyatakan bahwa kemudahan untuk memasuki pekerjaan di sektor formal bagi para migran dipengaruhi secara signifikan oleh karakteristik individu, terutama tingkat pendidikan. Dimana semakin tinggi pendidikan akan menghasilkan pengetahuan dan keterampilan yang tentunya lebih tinggi sehingga mampu bersaing dalam memperoleh pekerjaan yang baik di sektor formal.

Sementara penelitian Meng (2001) menyatakan hal yang berbeda, yaitu tingkat pendidikan nampaknya tidak memainkan peranan penting terhadap penentuan upah sektor formal, alih-alih berdampak signifikan terhadap variasi upah di sektor informal baik sebagai pengusaha maupun pekerja sektor informal.

**Gambar 6**  
**Komposisi Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja selama Seminggu yang Lalu pada Sektor Formal dan Informal dan Jumlah Jam Kerja pada Pekerjaan Utama Indonesia, 2015**

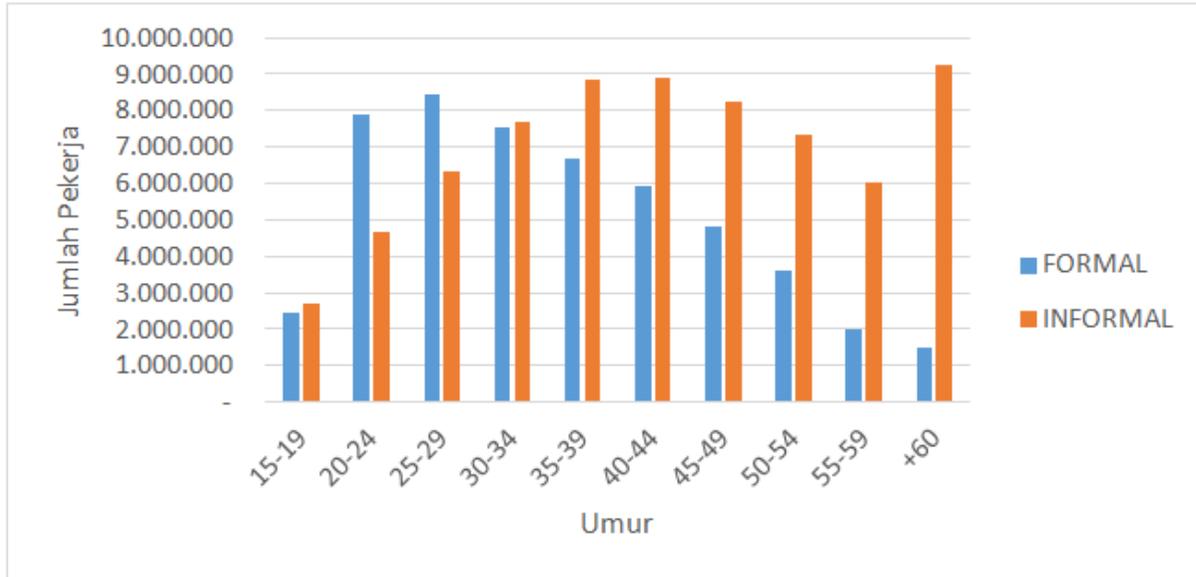


Sumber: BPS, 2015

Apabila dilihat dari jumlah jam kerja pada pekerjaan utama tahun 2015, maka dari setiap klasifikasi jam kerja, jumlah pekerja informal lebih banyak daripada pekerja formal, kecuali pada mereka yang bekerja 45-54 jam seminggu. Banyaknya pekerja informal yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu menunjukkan tingginya tingkat *underutilisation* pada sektor informal, dimana dengan rendahnya jam kerja juga menghasilkan tingkat produktifitas yang kurang optimal.

Berdasarkan golongan umur, mereka yang bekerja secara formal cenderung berada pada rentang usia dewasa muda yakni pada golongan umur di bawah 35 tahun. Dari gambar 8 tersaji bahwa para pekerja formal hanya lebih tinggi jumlahnya daripada pekerja informal untuk usia 20-24 tahun dan 25-29 tahun. Sementara untuk kelompok informal, persentase pekerjaannya cenderung meningkat seiring bertambahnya usia. Hal ini menunjukkan bahwa sektor informal dapat dimasuki pekerja dari golongan umur manapun (*low barrier to entry*), sehingga selalu menarik bagi angkatan kerja. Dan bagi mereka yang sudah berumur lebih dari 60 tahun dimana kemampuannya sudah menurun dan tentu saja kurang dapat bersaing, sektor informal lebih bersahabat untuk dimasuki.

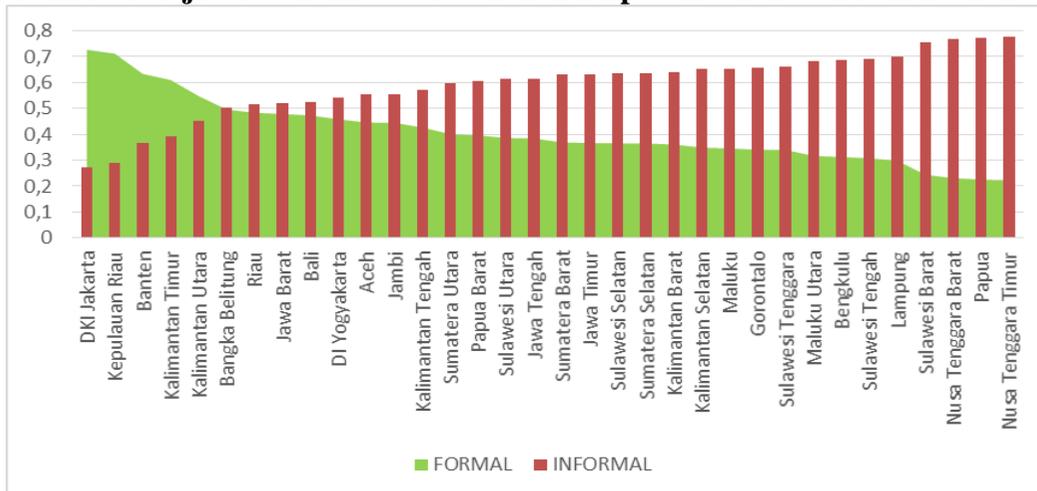
**Gambar 7**  
**Proporsi Komposisi Pekerja Formal dan Informal Menurut Golongan Umur Indonesia, 2015**



Sumber: BPS, 2015

Apabila dilihat berdasarkan provinsi maka komposisi pekerja informal tertinggi ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur diikuti Papua yang keduanya melampaui 77 persen. Sedangkan yang paling rendah adalah DKI Jakarta dan Kepulauan Riau yang pekerja informalnya hanya 27,3 persen dan 28,83 persen. Secara keseluruhan terdapat 13 provinsi yang proporsi pekerja informalnya lebih rendah dari rata-rata nasional. Ini berarti masih ada 21 provinsi yang proporsinya lebih tinggi daripada angka rata-rata nasional.

**Gambar 8**  
**Persentase Pekerja Formal dan Informal di Setiap Provinsi di Indonesia Tahun 2015**



Sumber: BPS, 2015

Hingga kini masih terjadi ketimpangan antara upah pekerja formal dengan pekerja informal. Pada tabel 3 tersaji bahwa terdapat 87,33 persen pekerja informal yang memperoleh upah lebih kecil dari rata-rata Upah Minimum Propinsi (UMP) 2014, yang besarnya Rp 1.506.231 (BPS, 2015), dibandingkan dengan hanya 54,44 persen pekerja formal. Secara keseluruhan, ada 61,33 persen pekerja yang menerima penghasilan di bawah upah minimum provinsi.

Adanya disparitas upah ini sejalan dengan temuan Widarti (2006) yang menyatakan bahwa nyatanya upah para pekerja di sektor informal tidaklah mengacu pada upah minimum sektor formal. Akan tetapi akibat kondisi ekonomi yang kurang menguntungkan serta keterbatasan lapangan pekerjaan, banyak tenaga kerja yang menerima pekerjaan untuk bertahan hidup dengan standar upah yang ditawarkan ketimbang tidak memiliki penghasilan sama sekali.

**Tabel 3**  
**Pekerja Menurut Status Pekerjaan dan Upah/Gaji/Pendapatan Bersih Sebulan di Indonesia, 2014**

NO	STATUS PEKERJAAN	UPAH/GAJI/PENDAPATAN BERSIH SEBULAN (ORANG)					TOTAL
		< Rp 500.000	Rp 500.000 - Rp 999.999	Rp 1.000.000 - Rp 1.499.999	Rp 1.500.000 - Rp 1.999.999	> Rp 2.000.000	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Berusaha sendiri	-	-	-	-	-	-
2	Berusaha dibantu buruh tidak tetap	-	-	-	-	-	-
3	Berusaha dibantu buruh tetap	-	-	-	-	-	-
4	Buruh/Karyawan/Pegawai	6.043.156	9.398.263	8.158.374	5.962.946	13.786.222	43.348.961
5	Pekerja bebas di Pertanian	2.670.778	1.410.574	439.272	153.106	65.580	4.739.310
6	Pekerja bebas di Non Pertanian	1.506.351	2.149.422	1.857.603	869.920	367.099	6.750.395
7	Pekerja tidak dibayar	-	-	-	-	-	-
<b>JUMLAH</b>		<b>10.220.285</b>	<b>12.958.259</b>	<b>10.455.249</b>	<b>6.985.972</b>	<b>14.218.901</b>	<b>54.838.666</b>
Rata-rata Upah 2014						1.506.231	
Total		61,33%			38,67%		100,00%
Formal		54,44%			45,56%		100,00%
Informal		87,33%			12,67%		100,00%

Sumber: Kemenakertrans, 2014 dan BPS, 2015

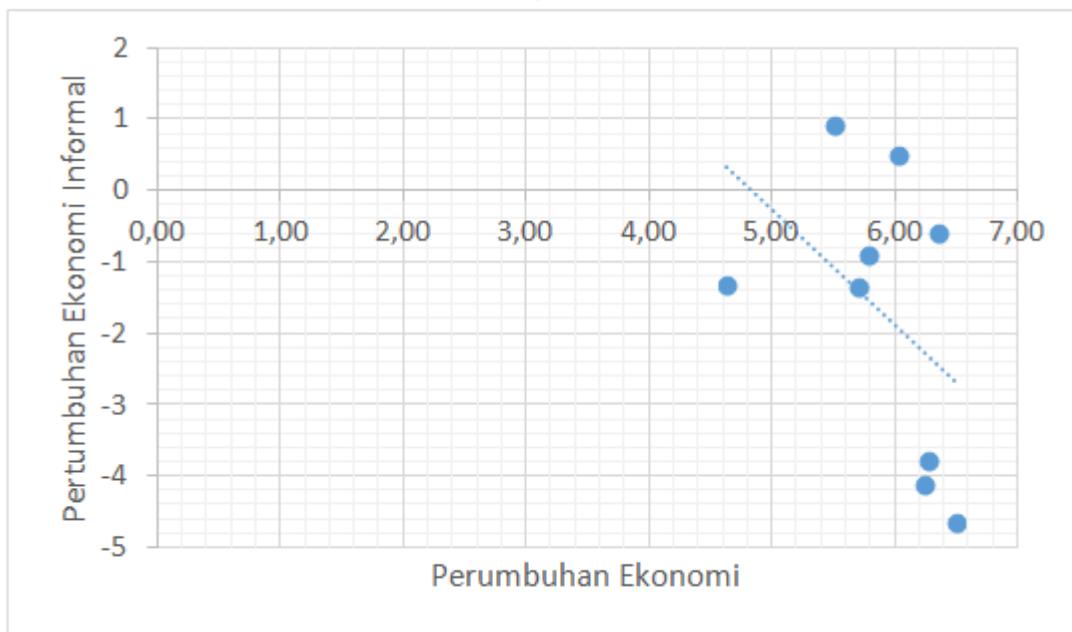
Keterbatasan data, terutama bagi besaran penghasilan pengusaha informal, tidak memungkinkan kita untuk melihat seberapa jauh disparitas pendapatan dengan pekerja informal lainnya, seperti tenaga kerja yang menerima upah di sektor informal, mereka yang berusaha sendiri, pekerja musiman, maupun pekerja rumahan, sebagaimana dikemukakan oleh Chen (2007) dan Meng (2001). Menurut penelitian empiris Meng, pengusaha informal memperoleh penghasilan yang lebih besar apabila dibandingkan dengan pekerja upahan informal dan pekerja formal.

Dari seluruh uraian di atas sejalan dengan karakteristik yang dikemukakan Bappenas (2009) dan Mohamad Ikhsan (2005) tentang sektor informal, yaitu:

1. Pekerja informal terbanyak berada ada sektor pertanian yaitu sebesar 90 persen walaupun dengan kecenderungan yang terus menurun.
2. Persyaratan masuk yang mudah karena sektor ini memberikan kebebasan pada angkatan kerja untuk masuk dan keluar kapan saja tanpa syarat, sebagaimana biasa diberlakukan pada sektor formal.
3. Waktu kerja yang fleksibel. Walaupun dari data yang disajikan pada tulisan ini mereka yang bekerja di sektor informal terbanyak adalah 35-44 jam seminggu, namun pekerja informal lebih banyak yang bekerja pada waktu kurang dari 35 jam seminggu.
4. Tidak ada batasan usia yang mengikat, atau bebas dimasuki oleh golongan umur berapapun. Sehingga memungkinkan bagi para pensiunan, misalnya, untuk dapat aktif sebagai pekerja informal. Dalam data yang tersaji pada tulisan ini terlihat proporsi pekerja informal yang makin besar seiring bertambahnya usia.
5. Rentang jenjang pendidikan yang lebih luas. Bagi mereka yang berpendidikan rendah, sektor informal merupakan satu-satunya pilihan dalam mempertahankan hidup karena mereka sangat sulit untuk memasuki sektor formal.
6. Upah yang rendah. Umumnya pekerja informal menerima upah lebih rendah daripada mereka yang bekerja di sektor informal. Sektor ini pun tidak sensitif terhadap pergerakan (kenaikan) upah minimum provinsi (UMP). Terlihat dari data bahwa proporsi pekerja informal yang menerima upah di bawah rata-rata upah minimum nasional adalah lebih besar ketimbang pekerja formal.

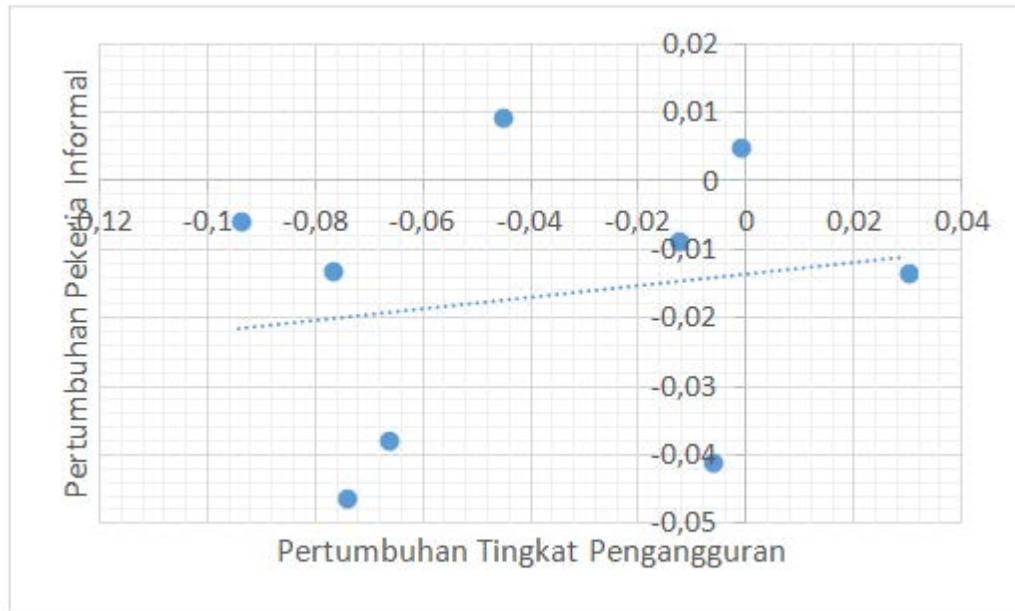
Selain uraian di atas digunakan beberapa paparan lain untuk melihat hubungan tingkat pekerja informal dengan beberapa indikator sebagaimana pada gambar 9 hingga gambar 11, sebagai berikut:

**Gambar 9**  
**Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi dengan Pertumbuhan Pekerja Informal**  
**Indonesia, 2005-2013**



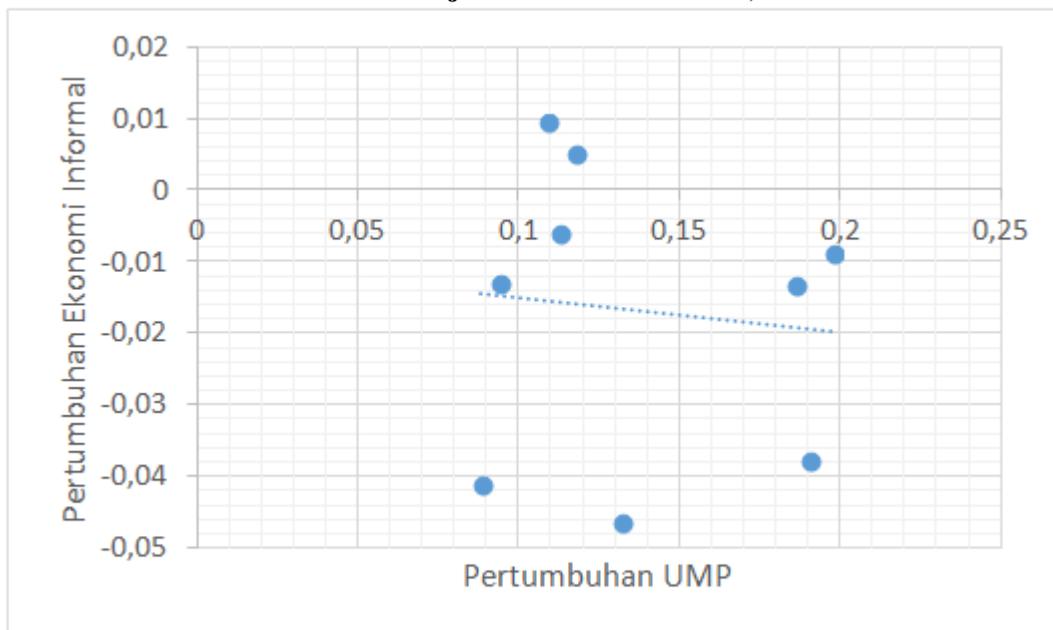
Sumber: BPS, diolah

**Gambar 10**  
**Hubungan antara Pertumbuhan Tingkat Pengangguran dengan Pertumbuhan Pekerja Informal Indonesia, 2006-2014**



Sumber: BPS, diolah

**Gambar 11**  
**Hubungan antara Pertumbuhan Tingkat Upah Minimum Provinsi dengan Pertumbuhan Pekerja Informal Indonesia, 2006-2014**



Sumber: BPS, diolah

1. Dari gambar 9 terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi berhubungan negatif dengan pertumbuhan pekerja informal. Artinya pertumbuhan ekonomi dapat menciptakan lapangan kerja yang memadai, khususnya di sektor formal, sehingga pertumbuhan pekerja informal semakin menurun seiring peningkatan pertumbuhan ekonomi.
2. Gambar 10 menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara pertumbuhan tingkat pengangguran dengan pertumbuhan pekerja informal. Dimana pada saat terjadi pengangguran maka tenaga kerjanya akan segera diserap ke ekonomi informal sebagai usaha untuk bertahan hidup. Hal ini menguatkan pandangan bahwa di Indonesia ekonomi informal, dalam bentuk kewirausahaan, banyak digeluti untuk sekedar bertahan hidup. Meminjam hirarki kebutuhan Abraham Maslow, ekonomi informal di Indonesia hanya berada pada tingkat yang kedua, yakni sebagai pemenuhan kebutuhan akan rasa aman, sehingga hanya berkembang pada tataran subsisten dengan keterampilan dan inovasi yang rendah.
3. Gambar 11 tersaji bahwa terdapat hubungan yang negatif antara pertumbuhan upah minimum provinsi (UMP) dengan pertumbuhan ekonomi informal. Berarti kenaikan upah merupakan momentum pendorong yang menjadikan angkatan kerja untuk segera berusaha beralih memasuki sektor formal dan meninggalkan sektor informal. Hal ini sejalan dengan Todaro yang mengemukakan bahwa sektor informal hanya merupakan transisi sebelum memasuki sektor formal (Todaro, 2006).

### **Simpulan**

Dari uraian di atas dapat diambil simpulan sebagaimana berikut:

1. Pekerja informal, yang umumnya tidak terlindungi jaminan sosial, tidak hanya ditemukan baik di sektor informal namun juga pada selain sektor informal;
2. Pertumbuhan ekonomi informal di Indonesia terus menurun yang dimulai sejak tahun 2010, walaupun jumlah unit usaha kecil dan menengah serta pekerjanya terus menunjukkan peningkatan. Hal ini mungkin disebabkan pertumbuhan usaha yang bersifat formal juga meningkat lebih pesat daripada usaha informal;
1. Pekerja Informal, baik yang berada di sektor informal maupun selain sektor informal, umumnya perempuan, berada di perdesaan, cenderung merata untuk semua golongan umur dan jam kerja, banyak yang berjenjang pendidikan rendah serta berpenghasilan minim;
2. Pertumbuhan ekonomi dan upah minimum provinsi berhubungan negatif dengan pertumbuhan ekonomi informal, sementara pertumbuhan tingkat pengangguran berhubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi informal.

### **Rekomendasi**

Fenomena kegiatan informal di Indonesia, sebagai negara berkembang, yang telah berlangsung sejak lama hendaknya tidak disikapi sebagai sesuatu yang alamiah. Kondisi pekerjaan yang kurang memadai, tanpa jaminan sosial dan kepastian dalam menghadapi masa depan, harus disikapi dengan bijak. Saat ini pemerintah telah mulai memfasilitasi pemberian perlindungan sosial, berupa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang juga mencakup layanan bagi pekerja informal, yang harus terus ditingkatkan kuantitas dan kualitas kepesertaannya.

Upah yang rendah seringkali menghambat pengembangan tingkat keterampilan mereka, sehingga dibutuhkan peran pemerintah untuk menyelenggarakan pelatihan bagi pekerja informal, misalnya melalui dinas tenaga kerja di masing-masing daerah, dimana

waktu pelatihan disesuaikan agar dapat dijangkau para pekerja, serta materi yang disesuaikan dengan permintaan pasar.

Pendidikan vokasi juga terbukti dapat meningkatkan akses terhadap pekerjaan di sektor formal. Untuk itu pembangunan sekolah vokasi yang berorientasi pasar juga baik untuk dilakukan. Misalnya dengan cara bekerja sama dengan industri manufaktur untuk sumbangan kurikulum dan pengajarnya sehingga lulusannya dapat langsung dipekerjakan di industri yang serupa.

Penyederhanaan perizinan dan perpajakan penting untuk dilakukan agar para pengusaha di sektor informal tidak enggan untuk melegalkan usahanya. Perlu kesediaan pemerintah, terutama pemerintah daerah melalui instrumen pajak daerahnya, untuk bersedia tidak memungut pajak dengan tarif maksimum demi peningkatan pertumbuhan usaha kecil ini. Pertumbuhan upah minimum yang sangat tinggi juga dapat menjadi disinsentif bagi pengusaha informal untuk menjadikan usahanya menjadi formal. Ditambah kenyataan bahwa upah para pekerja di sektor informal tidaklah mengacu pada upah minimum sektor formal yang menjadikan para pengusaha informal lebih nyaman untuk terus mempertahankan status informalnya. Kesenjangan upah antara pekerja ekonomi formal dan informal dapat dikurangi dengan pemberlakuan peraturan dan kebijakan pemerintah, yang dapat memfasilitasi terjadinya transisi dari ekonomi informal menuju formal. Sebagai salah satu cara dalam pemberian bimbingan kebijakan dalam hal ini maka Organisasi Perburuhan Dunia tengah melakukan proses penetapan standar dengan maksud untuk menciptakan Rekomendasi dalam rangka memfasilitasi transisi dari informal ke ekonomi formal (ILO, 2015).

Sebagian besar usaha pada ekonomi informal tidak dapat mengakses permodalan melalui lembaga keuangan. Akses terhadap permodalan, seperti PNPM maupun lembaga semacam Grameen Bank, juga perlu ditingkatkan untuk terus menjadikan usaha kecil menjadi berkembang.

Kemudahan akses transportasi dan informasi membuat pengusaha informal memperoleh lebih banyak informasi serta biaya transportasi dan logistik yang lebih rendah. Hal ini juga merupakan salah satu cara mendorong mereka, terutama yang berada di perdesaan, untuk membuat usahanya menjadi formal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, (2009), *Peran Sektor Informal Sebagai Katup Pengaman Masalah Ketenagakerjaan*. Kajian Evaluasi Pembangunan Sektoral. Kedeputan Evaluasi Kinerja Pembangunan. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik, (Berbagai terbitan), *Keadaan Ketenagakerjaan*. *Berita Resmi Statistik*.
- Badan Pusat Statistik, (2015), *Data Sosial dan Kependudukan*. <http://bps.go.id> Diakses pada November 2015.
- Badan Pusat Statistik, (2015), *Data Ekonomi dan Perdagangan*. <http://bps.go.id>. Diakses pada November 2015.
- Badan Pusat Statistik, (Berbagai terbitan), *Indikator Pasar Tenaga Kerja di Indonesia*. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik, (Berbagai terbitan), *Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia*. Jakarta.
- Bangaser, Paul E., (2000), *The ILO and the Informal Sector: An Institutional History*. International Labour Organization Employment Paper.

- Chen, Martha Alter, (2007), Rethinking Informal Economy: Linkages with the Formal Economy and the Formal Regulatory Environment. *Desa Working Paper* No. 46. ST/ESA/2007/DWP/46.
- Ikhsan, Mohamad, (2005), Peran Pasar Tenaga Kerja yang Fleksibel Dalam Mengatasi Pengangguran. *LPEM Working Paper* No. 11/2005. Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Universitas Indonesia, Jakarta.
- International Labour Organization, (2013), *Women and Men in the Informal Economy: A Statistical Picture*. Second Edition. Geneva.
- International Labour Organization, (2014), *Informality and the Quality of Employment in G20 Countries*; Report prepared for the G20 Labour and Employment Ministerial Meeting. Melbourne, Australia, 10-11 September 2014.
- International Labour Organization, (2015), *Global Wage Report 2014/15: Wages and Income Inequality*. International Labour Office – Geneva.
- Meagher, Kate, (2013), *Unlocking the Informal Economy: A Literature Review on Linkages Between Formal and Informal Economies in Developing Countries*. Women in Informal Employment: Globalizing and Organizing (WIEGO) Working Papers. Cambridge.
- Nazara, Suahasil, (2010), *Ekonomi Informal di Indonesia, Ukuran, Komposisi, dan Evolusi*. Organisasi Perburuahan Internasional, Kantor Perburuahan Internasional, Jakarta.
- Noeraini, Astrid Amalia, (2014), *Ekonomi Informal di Indonesia*. Tidak dipublikasikan.
- Kay, David Duane, (2011), *The Relationship Between Formal and Informal Employment in South Africa*. Thesis of the University of Illinois at Urbana-Champaign.
- Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, (2015), *Data Nasional Penduduk yang Bekerja*. Pusat Data dan Informasi Ketenagakerjaan Badan Penelitian Pengembangan dan Informasi. <http://pusdatnaker.balitfo.depnakertrans.go.id/kunasional/pyb/> Diakses Oktober-Desember 2014 dan November 2015.
- Manning, Chris, dan Devanto S. Pratomo, (2013), Do migrants Get Stuck in The Informal Sector? Findings from a Household Survey in Four Indonesian Cities. *Bulletin of Indonesian Economic Studies* Vol. 49, No. 2, 2013: 167-192.
- Meng, Xin, (2001), The Informal Sector and Rural-Urban Migration - A Chinese Case Study. *Asian Economic Journal* 2001, Vol. 15 No.1.
- Pardede, Elda Luciana dan Rahmanina Listya, (2013), Do They Look fo Informal Jobs?: Migration of the Working Age in Indonesia. *Working Paper in Economics and Business*. Volume III No. 8/2013. Demographic Institute, FEUI.
- Todaro, Michael P., dan Stephen C. Smith, (2006), *Pembangunan Ekonomi*. Edisi Kesembilan, Jilid I. Erlangga, Jakarta.
- Widarti, Diah, (2006), Peran Upah minimum dalam Penentuan Upah di Sektor Informal di Indonesia. *Paper Organisasi Perburuahan Internasional (ILO)*. Jakarta.
- Yamada, Gustavo, (1996), Urban Informal Employment and Self-Employment in Developing Countries: Theory and Evidence. *Economic Development and Cultural Change*. P.289-314.